

## ABSTRAK

### PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI JUDI ONLINE (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Deli Serdang)

Bagus Miranda\*

Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN\*\*

Dr. Ahmad Rusli Purba, SH., M.Hum\*\*\*

Judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Pelaku judi *online* tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian *online* yang berlaku di Indonesia, bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang, bagaimana hambatan Kepolisian Resor Deli Serdang dalam menanggulangi judi *online*.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan.

Pengaturan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana judi *online* yang telah dilakukan Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Poldasu masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum oleh unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda yaitu sanksi pidana terhadap judi *online* berdasarkan Pasal 45 UU ITE lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penerapan KUHP dan UU ITE dalam perkara judi *online* harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*, mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi.

**Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Judi Online.**

---

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE POLICE IN COMFORTING ONLINE GAMBLING (Research Study at Deli Serdang Resort Police)**

**Bagus Miranda\***

**Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN\*\***

**Dr. Ahmad Rusli Purba, SH., M.Hum\*\*\***

*Gambling via the internet (internet gambling) usually occurs due to placing bets on sports or casino activities via the internet. Online gambling perpetrators can be punished based on Article 27 paragraph (2) jo. Article 45 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The formulation of the problem in the research in this thesis is how the legal regulation of online gambling crimes applies in Indonesia, what is the role of the police in tackling online gambling in the jurisdiction of the Deli Serdang Resort Police, what are the obstacles to the Deli Serdang Resort Police in tackling online gambling.*

*The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical and empirical juridical research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials and field research.*

*Regulation of criminal acts of online gambling in Indonesia is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Law enforcement efforts carried out by the North Sumatra Police Ditreskrimsus Cyber Crime Unit against perpetrators of online gambling crimes which have been carried out by the North Sumatra Regional Police Ditreskrimsus Cyber Crime Unit still use the instrument Article 303 of the Criminal Code rather than Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 of the ITE Law.*

*The results of the discussion concluded that the obstacles to law enforcement by the Cyber Crime Unit of the Ditreskrimsus Polda, namely criminal sanctions against online gambling based on Article 45 of the ITE Law, are lower than the threat of criminal sanctions in Article 303 of the Criminal Code. Efforts to overcome these obstacles are the application of the Criminal Code and the ITE Law in online gambling cases. must prioritize the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, hold information technology guidance training.*

**Keywords: Prevention, Crime, Online Gambling.**